

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adib Bahari, K. U. (2009). *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Pustaka Yustisia.
- Adji, I. S. (2006). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media.
- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Media Pratama.
- Alkostar, A. (2009). *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintah di Negara Modern*.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Binawan, A. (2006). *Korupsi Kemanusiaan Menafsirkan (korupsi) dalam Masyarakat*. Kompas Media Nusantara.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka.
- Danil, E. (2011a). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Danil, E. (2011b). *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*. Rajawali Press.
- F.Isjwara. (1992). *Pengantar Ilmu politik*. Bina Cipta.

- Farida, A., & Nasichin. (2018). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia: Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transedental. *Seminar Nasional Hukum Transedental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 227–240. <http://hdl.handle.net/11617/9699>
- Gunawan, K. dan Y. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Refika Aditama.
- Hamdani, Y. (2011). *Akar Budaya Korupsi di Indonesia*.
- Hamzah, A. (2005a). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2005b). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Haryadi, P. C. dan S. (2016). *Korupsi dalam Sidang Sejarah Indonesia dari Dandels*. Komunitas Bambu.
- Hasibuan, A. (1997). *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hutaruk, L. H. (2012). *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Karya Putra Darwati.
- Indah, S. M. (2014). *Korupsi Dalam Bagian Interpretasi*.

- Johnson, L. (2006). *The United Nations Convention Against Corruption The Awakening Giant of Anticorruption Enforcement*.
- Kayam, U. (2005). *Dialog*. Metafor Publishing.
- Kleden, I. (2001). *Menulis Politik Indonesia Sebagai Utopia*. Kompas,
- Klitgaard, R. (2000). *Corrupt Cities A Practical Guide to Cure and Prevention*. Oakland.
- Liliweri, A. (2003). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. LKIS.
- Marwan, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Poespowardojo, S. (1989). *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. PT Gramedia.
- Pope, J. (2003). *Strategi Pemberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahmat, M. (2002). *Komunitas Antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Remaja Rosdakarya.
- RS, S. H. P. (1994). *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Alumni.
- Semma, M. (2008). *Negara dan Korupsi (pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafri, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Soedarso, B. (2009). *Latar Belakang sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Surachmin, D., & Cahaya, S. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Sinar Grafika.
- Tabalujan, B. S. (2001). *Legal Development in Development Countries*.
- V.Tanzi. (1998). *Corruption Around The World Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Staff Papers.
- Werdhiyani, I. G. A., & Parsa, I. W. (2020). Kriminalisasi Trading In Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Wiyanarti, E. (n.d.). *Artikel Jurnal Internasional Apps, Historia Korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif*.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. SUMBER LAIN

Budiman, M. (2017). *Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Farida, A., & Nasichin. (2018). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia: Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transedental. *Seminar Nasional Hukum Transedental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.*